

Pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPR Komisi V) terhadap kebijakan pendidikan

Rifki Achmad Ranggakusumah¹, Suryadi², Asep Suryana³

¹²³Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*Correspondence: E-mail: rifkiachmad9c@upi.edu

ABSTRACT

This study examines the surveillance role of the Regional People's Representative Council (DPRD Commission V) in overseeing education policy in West Java Province. The objective is to provide a clear understanding of the monitoring process, the existence and implementation of policy oversight, its outcomes, and the impact of DPRD Commission V's efforts to improve education quality in the province. The study is grounded in the DPRD's supervisory function as outlined in Law No. 23 of 2014 and the challenges faced in its implementation by the Bandung District DPRD. Using a descriptive-qualitative method, data were collected through interviews, documentation studies, and observations of DPRD Commission V (2019-2024) and triangulated with data from the West Java Provincial Education Department. Data were processed using Nvivo 12 software and analyzed by organizing, describing, interpreting, and summarizing findings. The results reveal that DPRD's monitoring employs both direct and indirect techniques. Overall, the surveillance efforts positively impact education quality in West Java, reflected in a notable rise in the Education Quality Report, with an average improvement of +7.37.

Penelitian ini mengkaji pengawasan DPRD Komisi V terhadap kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat untuk memahami proses, wujud, implementasi, hasil, serta dampak pengawasan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Latar belakang penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD Provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan kendala pengawasan oleh DPRD Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dengan data dari DPRD Komisi V periode 2019–2024 serta triangulasi data dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Analisis data dilakukan menggunakan Nvivo 12 melalui proses pengelompokan, deskripsi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan pengawasan dilakukan dengan teknik langsung dan tidak langsung. Secara umum, pengawasan ini berdampak positif pada mutu pendidikan di Jawa Barat, terlihat dari kenaikan rata-rata Rapor Mutu Pendidikan sebesar +7,37.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received: 16 Juli 2024

First Revised: 19 Agustus 2024

Accepted: 26 Sept 2024

First Available online: 1 Okt 2024

Publication Date: 1 Okt 2024

Keyword: Surveillance, DPRD, Education Policy, Education Quality.

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Kebijakan Pendidikan, Mutu Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, yang khusus membidangi masalah pendidikan, memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Penjelasan umum UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dipahami sebagai pemisahan pemerintahan daerah (administratif) dan DPRD (legislatif) untuk memperkuat DPRD dan memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Oleh karena itu, DPRD mempunyai hak yang cukup luas dan dirancang untuk mempertimbangkan dan mencerminkan aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi yang tertuang dalam Komentar Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan: DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut: (a) Fungsi legislatif; c)) fungsi anggaran.

DPRD mempunyai tiga fungsi utama: regulator, pembuat kebijakan, dan perencana anggaran. Sebagai regulator, DPRD bertugas mengatur dan mengawasi seluruh aspek kepentingan daerah, baik yang berkaitan dengan urusan anggaran daerah (otonomi) maupun urusan yang dilimpahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat (tugas penunjang). Peran politik (pembuatan kebijakan) meliputi perumusan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan di daerah. Kemampuan penganggaran kini mencakup Perencanaan Anggaran Daerah (APBD). Selain ketiga fungsi tersebut, DPRD juga berperan sebagai kekuatan penyeimbang, yang mempunyai misi mengatur dan mengendalikan keseimbangan kepala daerah dan seluruh tingkat pemerintahan daerah secara efektif (Kartiwa, 2006).

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat krusial dalam pembangunan bangsa. Kebijakan pendidikan yang efektif dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan, pada akhirnya, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, pelaksanaan kebijakan pendidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah kualitas, pemerataan, dan aksesibilitas. Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerahnya. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti anggaran pendidikan, kualitas guru, infrastruktur sekolah, serta kurikulum dan metode pembelajaran. Pengawasan yang efektif dari Komisi V dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkadang menghadapi berbagai kendala. Sebagaimana dalam temuan penelitian skripsi oleh Atip Wahidin yang menerangkan bahwa Hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Bandung salah satunya berhubungan dengan irisan waktu. DPRD Kabupaten Bandung tidak hanya mengawasi Perda penyelenggaraan pendidikan saja tetapi banyak Perda lain yang harus dibahas dan diawasi. Dan juga keterbatasan anggaran dikarenakan begitu luasnya wilayah Kabupaten Bandung sehingga memerlukan biaya dalam melakukan pengawasan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Komisi V DPRD menjalankan fungsi pengawasannya, tantangan apa saja yang dihadapi, serta strategi-strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan Komisi V DPRD terhadap kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengawasan DPRD, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPRD dan pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pendidikan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus kepada upaya mendeskripsikan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Komisi V) provinsi Jawa Barat terhadap kebijakan pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti berpandangan bahwa masalah ini lebih cocok diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Satori dan Komariah (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah

Berdasarkan pada paparan di atas, bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis akan meneliti data terkait fakta tentang pengawasan terhadap kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh DPRD Komisi V provinsi Jawa Barat termasuk mencari informasi terkait proses pengawasan kebijakan pendidikan, wujud pengawasan kebijakan Pendidikan, implementasi pengawasan kebijakan, hasil pengawasan kebijakan, dan dampak implikasi pengawasan kebijakan Pendidikan.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber utama dari mana informasi itu berasal. Sumber ini membahas pentingnya sumber data primer dalam proses desain skema konseptual, khususnya identifikasi entitas dan karakteristik terhadap suatu pembahasan (Pramiyati et al., 2017). Penelitian ini mengambil sumber data primer dari narasumber anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan data sekunder berupa dokumen berupa buku, catatan dan arsip lainnya yang memiliki kaitan dengan obyek penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Mekanisme atau prosedur yang digunakan oleh DPRD dalam perencanaannya sebelum melaksanakan fungsi pengawasan adalah berkomunikasi dalam bentuk rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi sebagai mitra kerja, yang didalam kegiatan tersebut membahas

penganggaran dan program pengawasan yang diatur dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sosialisasi Pengawasan telah dilaksanakan disaat rapat kerja dengan mengundang semua pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Cabang Dinas Wilayah yang telah mewakili semua sekolah.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran utama, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan Provinsi juga berkolaborasi dengan tenaga ahli baik dari akademisi dan praktisi, Kelompok pakar atau tenaga ahli terdiri merupakan pakar atau ahli yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Wujud Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didampingi Kantor Cabang Dinas Wilayah yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi juga turun ke lapangan. Bidang garapan merupakan kerangka kerja untuk memandu kegiatan di lapangan (Prawiradilaga, 2012:138), bidang garapan perencanaan untuk pendidikan terutama yang menjadi kewenangan di tingkat provinsi adalah Sekolah Menengah Atas, Kejuruan, dan Pendidikan Khusus. Pelaksanaan pengawasan kebijakan Pendidikan diagendakan setiap bulan secara rutin. Penjadwalan pelaksanaan pengawasan kebijakan Pendidikan akan disesuaikan dengan kebutuhan berpaku pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di awal tahun.

Mekanisme yang digunakan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Dinas Pendidikan adalah mengawasi secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan melihat langsung ke lapangan, terutama sekolah favorit karena isu-isu yang perlu dikaji lebih sering terjadi di sekolah favorit, termasuk pada saat pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan kebijakan untuk melihat bagaimana kesiapan sekolah dan pelaksana kebijakan terkait, pengawasan diluar sekolah favorit tetap dilaksanakan pengawasan namun dalam bentuk pengawasan tidak langsung.

Program dari Dinas Pendidikan merupakan tools yang dibutuhkan oleh DPRD, seperti halnya Dinas Pendidikan mengawasi capaian sekolah melalui aplikasi yang dibangun oleh Kemdikbudristek yaitu Rapor Pendidikan. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Jawa Barat, juga Pendidikan di Jawa Barat bisa di rasakan oleh semua pihak, terlebih meningkatnya usia harapan sekolah dengan kata lain mengejar program wajib belajar 12 tahun, dengan beralatkan semua indikator kinerja Dinas Pendidikan, Sekolah, dan DPRD tercapai.

Tabel 1 Indeks Pendidikan 2023

Wilayah	Indeks Pendidikan			
	2022	2021	2020	2019
Jawa Barat	64.32	63.73	63.22	62.57

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Aturan atau pedoman yang digunakan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan pengawasan adalah tidak keluar dari apa yang sudah direncanakan dalam RKPD. Evaluasi terhadap proses pengawasan yang telah dilakukan adalah dengan cara mengadakan rapat internal antara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah) dan Dinas Pendidikan Provinsi, untuk melihat efektivitas atau keberhasilan fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan. Evaluasi internal terhadap proses pengawasan yang telah dilakukan akan menghasilkan bahan perencanaan atau gambaran untuk proses pengawasan yang akan dilakukan selanjutnya.

Hasil Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Pengawasan kebijakan Pendidikan ini sangat memberi peluang untuk mendapatkan gambaran tentang perencanaan kebijakan kedepannya, dan jika berbicara tentang hambatan yang terjadi, banyak aspirasi yang seharusnya bisa langsung tersampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tetapi disampaikan kepada pihak lain seperti LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan Jalan keluar terbaik dari setiap bentuk hambatan yang terjadi adalah beraudiensi secara langsung dengan Komisi V – DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam penyelesaian hambatan DPRD dan Dinas Pendidikan memiliki peran utama, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan tenaga ahli baik dari akademisi dan praktisi karena setiap orang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda. Kebijakan yang tidak selalu bisa memuaskan semua pihak menjadi pemicu setiap hambatan, karena keinginan setiap orang akan berbeda. Menurut penulis kebijakan yang ideal sulit untuk diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Dampak dan Implikasi Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Setiap masukan akan dijadikan rujukan dan program akan diperbaiki, kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan dan kebijakan yang dihasilkan harus berpihak kepada masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sangat optimis bahwa pengawasan kebijakan Pendidikan ini akan memberi impact positif kepada tujuan dan sasaran Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Pengawasan yang dilakukan DPRD Komisi V dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus dilakukan agar senantiasa menumbuhkan kekuatan terhadap amanah masyarakat. Pengawasan Kebijakan Pendidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menghasilkan Nota Komisi, yaitu merupakan catatan temuan selama melaksanakan fungsi pengawasan dan akan diperjuangkan di dalam rapat kerja dan di badan anggaran. Tindak lanjut setelah itu adalah memberi masukan dan gambaran terkait perencanaan kebijakan selanjutnya kepada mitra kerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Pembahasan

Proses Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan hasil temuan. Mekanisme atau prosedur yang digunakan oleh DPRD dalam perencanaannya sebelum melaksanakan fungsi pengawasan adalah berkomunikasi dalam bentuk rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi sebagai mitra kerja. Bentuk komunikasi yang digunakan adalah komunikasi Horizontal disebut juga komunikasi lateral (Joko Purwanto dalam Mulyani & Iriana, 2021) yaitu komunikasi yang terjadi antara bagian atau departemen yang memiliki kedudukan yang setara dalam suatu organisasi.

Sosialisasi perlu dilaksanakan karena sosialisasi adalah suatu upaya untuk memberi informasi tentang suatu kabar atau berita. Dalam rapat kerja, pihak yang terkait dapat

mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari pengawasan suatu kebijakan dengan lebih jelas. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Berkolaborasi dengan tenaga ahli baik dari akademisi dan praktisi, Kelompok pakar atau tenaga ahli terdiri merupakan pakar atau ahli yang mempunyai disiplin ilmu yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD yang diusulkan oleh anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Untuk mekanisme pengangkatan, syarat serta uraian tugas dari pada Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dilibatkannya tenaga ahli baik dari akademisi dan praktisi adalah bentuk keseriusan DPRD dan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menimbang latar belakang anggota DPRD itu berbeda dan setiap anggota belum tentu menguasai penuh tentang bidang yang dikaji.

Wujud Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Seperti halnya sebelum melakukan pengawasan, sosialisasi implementasi kebijakan tentu dilaksanakan dengan bentuk mengadakan rapat kerja dengan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Cabang Dinas Wilayah yang telah mewakili semua sekolah, Berdasarkan temuan penelitian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didampingi Kantor Cabang Dinas Wilayah yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi juga turun ke lapangan. Menurut Horton dan Hunt (1989) sosialisasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pelaksanaan pengawasan kebijakan Pendidikan diagendakan setiap bulan secara rutin. Penjadwalan pelaksanaan pengawasan kebijakan Pendidikan akan disesuaikan dengan kebutuhan berpaku pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di awal tahun. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sementara itu, Dinas Pendidikan memiliki agenda pengawasan sendiri, artinya pengawasan dilakukan tanpa melibatkan DPRD yang dilaksanakan satu tahun sekali secara formal, namun diluar formal juga dilaksanakan setiap bulan dan jika DPRD melakukan pengawasan pasti melibatkan dinas Pendidikan.

Penjadwalan dalam pengawasan itu penting karena dengan penjadwalan yang baik, sumber daya seperti tenaga kerja dan waktu dapat digunakan dengan lebih efisien. Ini membantu menghindari pemborosan dan memastikan semua elemen yang dibutuhkan untuk pengawasan tersedia pada waktu yang tepat. Pengawasan yang teratur dapat membantu mendeteksi masalah sebelum mereka berkembang menjadi lebih besar. Mekanisme yang digunakan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Dinas Pendidikan adalah mengawasi secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan melihat langsung ke lapangan, terutama sekolah favorit karena isu-isu yang perlu dikaji lebih sering terjadi di sekolah favorit, termasuk pada saat pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan kebijakan untuk melihat bagaimana kesiapan sekolah dan pelaksana kebijakan terkait, pengawasan diluar sekolah favorit tetap dilaksanakan pengawasan namun dalam bentuk pengawasan tidak langsung.

Sejalan dengan fungsi pengawasan dalam administrasi Pendidikan menurut Hadijaya (2012) bahwa Di bidang pendidikan, pengawas merupakan individu atau personil pendidikan

yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Temuan ini sejalan dengan Teknik pengawasan menurut Menurut Simbolon (2004) yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Jawa Barat, juga Pendidikan di Jawa Barat bisa di rasakan oleh semua pihak, terlebih meningkatnya usia harapan sekolah dengan kata lain mengejar program wajib belajar 12 tahun, dengan beralatkan semua indikator kinerja Dinas Pendidikan, Sekolah, dan DPRD tercapai. Setelah penulis hitung angka selisih setiap tahunnya pada rapor pendidikan, didapatkan angka rata-rata keseluruhan yang menunjukkan angka kenaikan yaitu senilai +7,37 dan menilik angka kenaikan yang ada di Indeks Pendidikan (diakses melalui <https://jabar.bps.go.id/site/resultTab>) dapat memberi arti bahwa menurut penulis tujuan pengawasan kebijakan Pendidikan ini belum bisa dipastikan telah efektif dilaksanakan meskipun telah menunjukkan angka kenaikan pada rapor pendidikan, karena data pada rapor Pendidikan hanya tercantum data selama dua tahun, sangat disayangkan tidak ada data capaian tahun 2023, 2020, dan 2019 pada rapor Pendidikan yang penulis dapat dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Lihat lampiran 7), juga angka kenaikan pada Indeks Pendidikan per tahunnya belum signifikan.

Implementasi Pengawasan Kebijakan Pendidikan.

Pengawasan kebijakan Pendidikan melibatkan berbagai aturan dan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, dalam hal ini penulis tidak menemui data yang lebih terang mengenai aturan dan pedoman atau standar yang digunakan oleh DPRD Komisi V dalam melaksanakan pengawasan kebijakan pendidikan. Proses pengawasan yang terlaksana dengan efektif dan efisien menjadi kriteria utama yang diharapkan dalam melaksanakan pengawasan kebijakan pendidikan.

Evaluasi terhadap proses pengawasan kebijakan pendidikan penting untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pengawasan tercapai dengan efektif. Evaluasi harus menilai sejauh mana pengawasan kebijakan pendidikan berhasil dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, serta dalam memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Disamping itu, harus mengevaluasi keterpaduan dan koordinasi antara berbagai lembaga atau pihak yang terlibat dalam pengawasan kebijakan Pendidikan. Evaluasi internal terhadap proses pengawasan yang telah dilakukan akan menghasilkan bahan perencanaan atau gambaran untuk proses pengawasan yang akan dilakukan selanjutnya. Perencanaan adalah pondasi dari kesuksesan dalam hampir semua aspek kehidupan, Perencanaan sangat membantu dalam menentukan tujuan-tujuan yang jelas dan membuat langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Perencanaan yang tepat akan mengantisipasi kecenderungan bergerak tanpa arah yang jelas, membuang waktu dan sumber daya.

Hasil Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan hasil temuan, Pengawasan kebijakan Pendidikan ini sangat memberi peluang untuk mendapatkan gambaran tentang perencanaan kebijakan kedepannya, dan jika berbicara tentang hambatan yang terjadi, banyak aspirasi yang seharusnya bisa langsung

tersampaikan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tetapi disampaikan kepada pihak lain seperti LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). Ini menyebabkan perpanjangan tangan yang tidak perlu. Disamping itu, yang menjadi hambatan lain adalah tidak semua temuan di lapangan bisa langsung ditindaklanjuti karena perlu penyesuaian dengan postur anggaran dan program prioritas.

Jalan keluar terbaik dari setiap bentuk hambatan yang terjadi adalah beraudiensi secara langsung dengan Komisi V – DPRD Provinsi Jawa Barat. Menurut Effendy (2013) audiensi adalah kumpulan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang dituju dan keberhasilan komunikasi seringkali tergantung pada seberapa baik pesan yang disampaikan dalam audiensinya, dengan mengenal audiensinya memungkinkan kita untuk menggunakan bahasa, gaya, dan pendekatan yang lebih relevan dan dapat dipahami oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) khususnya Komisi V (Lima). Komunikasi yang efektif membutuhkan pembangunan hubungan yang baik dengan audiens, dengan memperhatikan siapa mereka, kita dapat membangun koneksi yang lebih kuat dan membuat audiens merasa dihargai.

Dalam penyelesaian hambatan DPRD dan Dinas Pendidikan memiliki peran utama, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan tenaga ahli baik dari akademisi dan praktisi karena setiap orang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda. Melalui kolaborasi artinya dapat memanfaatkan kekuatan individu untuk mencapai tujuan bersama lebih efektif daripada bekerja sendiri. Kolaborasi memungkinkan adanya pertukaran ide, sudut pandang, dan pendekatan yang berbeda. Ini dapat memungkinkan tim untuk menghasilkan solusi yang lebih baik.

Kebijakan yang tidak selalu bisa memuaskan semua pihak menjadi pemicu setiap hambatan, karena keinginan setiap orang akan berbeda. Menurut penulis kebijakan yang ideal sulit untuk diimplementasikan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Pemerintah pasti mengalami kesulitan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, yang mungkin tidak memuaskan semua pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan memiliki perbedaan nilai, keyakinan, atau prinsip yang mendasar. Ini dapat menyebabkan ketegangan atau konflik ketika mencoba mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Disamping itu, keterbatasan anggaran kebijakan juga ketidaksesuaian dengan program prioritas menjadi faktor tambahan pemicu timbulnya hambatan.

Dampak dan Implikasi Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan hasil temuan, setiap masukan akan dijadikan rujukan dan program akan diperbaiki, kerja sama antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan dan kebijakan yang dihasilkan harus berpihak kepada masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sangat optimis bahwa pengawasan kebijakan Pendidikan ini akan memberi impact positif kepada tujuan dan sasaran Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Tujuan dan sasaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat umumnya sejalan dengan tujuan dan sasaran pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, seperti di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, bertujuan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi penerus untuk menjadi warga negara yang kompeten, berdaya saing, dan memiliki moralitas yang tinggi.

Pengawasan yang dilakukan DPRD Komisi V dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan terus dilakukan agar senantiasa menumbuhkan kekuatan terhadap amanah masyarakat. Amanah rakyat terhadap tupoksi ini adalah bahwa DPRD harus secara aktif mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah dan menggunakan mekanisme kontrolnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan program-program publik.

Pengawasan Kebijakan Pendidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menghasilkan Nota Komisi, yaitu merupakan catatan temuan selama melaksanakan fungsi pengawasan dan akan diperjuangkan di dalam rapat kerja dan di badan anggaran. Tindak lanjut setelah itu adalah memberi masukan dan gambaran terkait perencanaan kebijakan selanjutnya kepada mitra kerja DPRD. Tindak lanjut dari pengawasan kebijakan pendidikan merupakan langkah-langkah yang diambil setelah hasil pengawasan terhadap kebijakan pendidikan ditemukan. Menurut penulis, ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diimplementasikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para stakeholders Pendidikan. (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Proses pengawasan implementasi kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat tergambar dengan melibatkan komunikasi antara DPRD pihak terkait lainnya. DPRD merupakan peran utama dalam pengawasan kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, walaupun dalam pelaksanaan pengawasannya tetap memerlukan komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan pihak terkait itu. Proses pengawasan dilakukan secara langsung terhadap objek dan sasaran yang harus diawasi. Namun dalam mengukur capaian program-program pendidikan, masih menggunakan aplikasi Rapor Pendidikan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Jawa Barat, khususnya angka harapan sekolah tuntas selama 12 tahun. Evaluasi dan tindak lanjut proses pengawasan ditujukan sebagai masukan-masukan agar dijadikan rujukan untuk perbaikan program-program Pendidikan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abislom, R. L. (2013). *Kedudukan dan Fungsi Badan Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945*. Lex Administratum. Vol 1.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Arwildayanto, A. S. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Cendekia Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Garret, J. E. (1993). *Public Administration and Policy Implementation: A Social Work Perspective*. International Journal Of Public Administration.
- Horn, D. V. (1975). *The Policy Implementation Process*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Imron, A. (2008). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia; Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irianto, Y. B. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Manullang, M. (1983). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Mufiz, A. (1999). *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta : Universitas Terbuka Depdikbud.
- N. P., & Hendarmawan. (2012). *Metodologi Penelitian Kebijakan* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. D. (2011). *Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Edisi Ketiga Revisi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi. 1990. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.